

# ANALISIS PENENTUAN KARAKTERISTIK DAN KRITERIA PINJAMAN TANPA BUNGA PADA PERUSAHAAN INTRAGRUP DARI SISI PERPAJAKAN

Niken Rogo Rahayuningtias<sup>1)</sup> Arifah Fibri Andriani<sup>2)</sup>

<sup>1)</sup>Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan  
e-mail : niken.rogo@gmail.com

<sup>2)</sup>Politeknik Keuangan Negara STAN  
e-mail : arifahfibri@gmail.com

## Abstract

*Interest free loans between intragroup companies who have a special relationship is a transaction that is prevalent in the business world. However, in terms of taxing, these transactions require restrictions in order to prevent tax avoidance efforts. One form of tax avoidance is transfer pricing schemes. No exception to the interest-free loan transactions. Therefore, need to be assessed arm's length principle on this transaction using functional analysis and comparability analysis.*

*Field data indicate a dispute between the taxpayer with the tax officer in determining the characteristics of the interest-free loan, criteria of the interest-free loans that reflects the arm's length transaction, and the determination of financial distress as one of the criteria of interest-free loan. This research aims to settle the dispute subject.*

*The results of this research showed that the characteristics of the interest-free loan can be seen from its character as a loan and the characters that sets it apart from the capital. Criteria of interest-free loan in Indonesia have already reflects the arm's length transaction in accordance to intercompany loan functional analysis. A company in financial distress can receive interest-free loan if the company is in a state of insolvency.*

**Keyword:** special relationship, arm's length, transfer pricing, interest-free loan.

## PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Dalam melakukan analisis atas transaksi pinjaman tanpa bunga, fakta di lapangan menunjukkan adanya sengketa (*dispute*) antara WP dan fiskus. Putusan pengadilan pajak tentang sengketa transaksi pinjaman tanpa bunga dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Putusan Pengadilan Pajak atas Transaksi Pinjaman Tanpa Bunga

No.	Putusan Pengadilan	Keputusan	Nilai yang dikembalikan
1.	PUT.29544/PP/M/VI/15/2011	Mengembalikan sebagian	Rp2.649.347.332
2.	PUT.31261/PP/M/XV/15/2011	Menolak	-
3.	PUT.43501/PP/M/XIII/15/2013	Mengembalikan seluruhnya	Rp1.846.763.000
4.	PUT.44876/PP/M/V/15/2013	Mengembalikan sebagian	Rp32.198.866.000
5.	PUT.46746/PP/M/XI/12/2013	Mengembalikan seluruhnya	Rp2.756.546.489
6.	PUT.49884/PP/M/XV/15/2014	Mengembalikan seluruhnya	Rp2.546.801.817
7.	PUT.51874/PP/M/XVA/12/2014	Menolak	-
8.	PUT.51873/PP/M/XVA/12/2014	Menolak	-
9.	PUT.58582/PP/M/VII/12/2014	Mengembalikan seluruhnya	Rp51.367.634.659
Total			Rp91.393.893.297

Sumber: Diolah dari data putusan pengadilan pajak tahun 2011 s.d. 2014

Sengketa pada Tabel 1 terjadi dalam hal penentuan karakteristik pinjaman tanpa bunga, kriteria untuk mengidentifikasi diperkenankannya pinjaman tanpa bunga dan penentuan kondisi kesulitan keuangan sebagai salah satu kriteria diperkenankannya pinjaman tanpa bunga. Dari data putusan pengadilan pajak,

penulis menemukan bahwa sejak tahun 1992 hingga saat ini telah terjadi kurang lebih 33 putusan terkait transaksi pinjaman tanpa bunga dengan kondisi 76% DJP mengalami kekalahan. Siapa pun yang dimenangkan dalam sengketa ini, baik WP maupun DJP telah menanggung *cost of tax collection* dan *cost of tax compliance* yang lebih tinggi dibanding ketika sengketa tidak terjadi, terutama ketika terdapat potensi pajak yang hilang. Hal tersebut memberi dampak negatif bagi penerimaan negara. Sesuai data dari Kementerian Keuangan, pada tahun 2014 realisasi target penerimaan pajak Indonesia adalah 91,7%.

### 2. Tujuan Penelitian

- Menjelaskan karakteristik pinjaman tanpa bunga pada perusahaan intragrup.
- Mengetahui kesesuaian kriteria diperkenankannya pinjaman tanpa bunga saat ini dalam mencerminkan kewajaran transaksi berdasarkan analisis fungsional.
- Menjelaskan koridor kondisi kesulitan keuangan sebagai salah satu kriteria diperkenankannya pinjaman tanpa bunga pada perusahaan intragrup.

## TINJAUAN TEORITIS

### 1. Konsep *Tax Avoidance*

Menurut Danny dan Darussalam (2009, 1), *tax avoidance* biasanya diartikan sebagai suatu skema transaksi yang ditujukan untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*loophole*) ketentuan perpajakan suatu negara. Hal ini sesuai dengan kepentingan perusahaan yang berorientasi laba, baik perusahaan domestik maupun multinasional.

Danny dan Darussalam (2009, 1) berpendapat *tax avoidance* dibagi menjadi *acceptable tax avoidance* dan *unacceptable tax avoidance*. Namun, masing-masing negara memiliki pandangan berbeda tentang batasannya. Dalam menghadapi skema-skema *tax avoidance* umumnya suatu negara menerbitkan ketentuan *anti avoidance rule* sebagai berikut.

a. *Specific Anti Avoidance Rule* (SAAR), yaitu ketentuan anti penghindaran pajak atas transaksi seperti *transfer pricing*, *thin capitalization*, *treaty shopping*, dan *Controlled Foreign Corporation* (CFC).

b. *General Anti Avoidance Rule* (GAAR), yaitu ketentuan anti penghindaran pajak untuk mencegah transaksi yang dilakukan oleh wajib pajak yang semata-mata untuk tujuan penghindaran pajak atau transaksi yang tidak mempunyai substansi bisnis.

### 2. Konsep *transfer pricing*.

*Transfer pricing* dalam perspektif perpajakan menurut Darussalam (2013, 9) “adalah suatu kebijakan harga dalam transaksi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa.” Proses kebijakan tersebut menentukan pula besaran penghasilan dari setiap entitas yang terlibat.

Dalam *article 9* OECD Model, hubungan istimewa diartikan sebagai hubungan antara dua atau lebih entitas yang memiliki partisipasi secara langsung maupun tidak langsung dalam manajemen, penguasaan atau penyertaan modal.

Disebutkan oleh Darussalam (2013: 69), *article 9* OECD Model juga menyatakan bahwa suatu negara diperbolehkan melaksanakan kewenangan domestiknya dalam mengoreksi *transfer pricing* dalam hal: (1) terdapat transaksi di antara entitas yang memiliki hubungan istimewa; dan (2) transaksi tersebut tidak sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha.

Pemahaman mengenai prinsip kewajaran

dan kelaziman usaha menurut Darussalam (2013, 92) yang mengutip *OECD Guidelines* berawal dari premis bahwa kondisi hubungan komersial dan keuangan dari transaksi yang dilakukan oleh perusahaan independen ditentukan oleh kekuatan pasar. Sedangkan kekuatan kontrol yang dimiliki oleh pihak yang berafiliasi dapat mendorong keputusan bisnis yang tidak mengacu pada pertimbangan rasional. Prinsip kewajaran dan kelaziman usaha diletakkan dalam tiga lapisan hierarki, yaitu kewajaran dan kelaziman usaha pada: struktur, perilaku dan kinerja.

Analisis kesebandingan digunakan untuk menilai kewajaran transaksi afiliasi. Oleh karena itu, diperlukan pembanding yang andal dan memiliki derajat kesebandingan yang tinggi. Perlu dilihat atribut-atribut transaksi yang secara material berpengaruh. Atribut-atribut tersebut disampaikan oleh Darussalam (2013, 142) tercermin dalam lima faktor kesebandingan yang di antaranya adalah analisis fungsional.

Tujuan dilakukannya analisis fungsional menurut Darussalam (2013, 109) adalah untuk mendapatkan informasi mengenai peran, tanggung jawab serta substansi ekonomi dari rangkaian transaksi dalam grup.

Darussalam (2013, 113-117) menulis bahwa terdapat setidaknya tiga pertimbangan dalam melakukan analisis fungsional.

- 1) Identifikasi proses bisnis yang relevan.
- 2) Ketentuan kontrak.
- 3) Derajat keterlibatan pihak-pihak dalam aktivitas.

### 3. Pendanaan Internal.

Pendanaan internal menurut Bambang Riyanto (2004, 25) dalam bukunya *Dasar-Dasar Pembelanjaan Perusahaan* adalah bentuk dana dimana pemenuhan kebutuhan dananya berasal dari dalam perusahaan itu sendiri, di antaranya dalam bentuk dana dari pemilik perusahaan.

Pendanaan internal dari pemilik perusahaan dapat berupa utang/ pinjaman dan modal. Khusus perusahaan grup, dapat memanfaatkan pendanaan dari perusahaan afiliasinya. Salah satunya berbentuk pinjaman yang dikenal dengan istilah *intercompany loan*.

Pinjaman dalam ilmu akuntansi dikategorikan dalam definisi kewajiban. Menurut PSAK Nomor 57, “Kewajiban adalah kewajiban kini entitas yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya diperkirakan mengakibatkan pengeluaran sumber daya entitas.”

Menurut PSAK Nomor 26 tentang Biaya Pinjaman yang diadopsi dari IAS 23 *Borrowing Costs*, disebutkan bahwa “Biaya pinjaman adalah bunga dan biaya lain yang ditanggung entitas sehubungan dengan peminjaman dana.

Karakteristik utang/ pinjaman dibanding modal menurut Darussalam (2013, 438) yang mengutip Marjana Helminen dapat dilihat pada Tabel 2.

**Tabel 2.** Karakteristik Utang dan Penyertaan Modal

Utang	Penyertaan modal
Dana akan dikembalikan sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan	Dana hanya akan dikembalikan pada saat likuidasi
Imbalan dari utang tetap harus dibayar meskipun penerima utang dalam keadaan merugi	Imbalan dari penyertaan modal tergantung dari performa usaha penerima modal
Dalam keadaan likuidasi, kreditor memiliki hak prioritas untuk atas aset	Hak pemberi modal atas aset adalah hak tagih terakhir setelah kreditor
Kreditor tidak memiliki kontrol atas perusahaan	Pemberi modal memiliki control atas perusahaan

**Sumber:** Darussalam, *Transfer pricing: Ide, Strategi, dan Panduan Praktis dalam Perspektif Pajak Internasional* (Jakarta: DDTC, 2013), hal. 438.

OECD tidak secara khusus memberi perhatian kepada transaksi pendanaan internal. Namun, *OECD Report 1979* Bab V menyatakan ada dua hal yang harus dilakukan sebelum menentukan tingkat bunga wajar pada pendanaan internal berupa pinjaman, yaitu menganalisis substansi transaksi dan kelaziman syarat dalam perjanjian pinjaman. Lebih lanjut pada *OECD Guideline 2010* Paragraf 1.65 menyatakan bahwa apabila suatu transaksi tidak terbukti secara substansi sebagai pinjaman maka otoritas pajak berwenang melakukan reklasifikasi menjadi transaksi penyertaan modal dan mengenakan pajak sesuai hasil reklasifikasi tersebut.

Analisis *intercompany loan* berikut dilakukan untuk menilai sejauh mana perusahaan intragrup berlaku rasional dalam memberikan pinjaman sesuai motif dan tujuannya.

- 1) Analisis substansi transaksi.
- 2) Analisis kelayakan kredit.
- 3) Evaluasi syarat dan kondisi yang terkait.
- 4) Estimasi tingkat bunga wajar.

#### 4. *Financial Distress*.

Menurut Fachrudin (2008,2-3) yang mengutip dari Bringham dan Gapenski, terdapat

empat tipe *financial distress* sebagai berikut.

##### a. *Economic failure*.

Kondisi ini terjadi ketika perusahaan tidak dapat menutupi total biayanya, termasuk *cost of capital*.

##### b. *Business failure*.

Kondisi ini terjadi ketika bisnis menghentikan operasinya akibat kerugian kepada kreditor.

##### c. *Insolvency*.

1) *Technical insolvency*, kondisi ini terjadi jika perusahaan tidak dapat memenuhi kewajiban lancarnya.

2) *Insolvency in Bankruptcy*, kondisi ini terjadi jika nilai buku utang lebih besar dari nilai pasar aset.

d. *Legal bankruptcy*, kondisi ini terjadi saat perusahaan sudah bangkrut secara hukum.

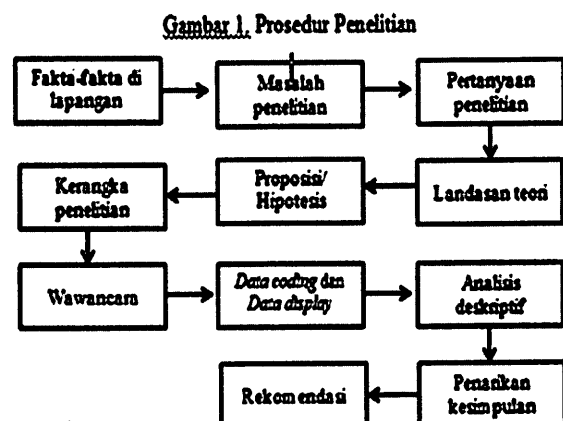
## METODE PENELITIAN

### 1. Model penelitian.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, pendekatan *grounded theory*, dan analisis induktif. Penelitian kualitatif menurut Creswell (2014, 4) merupakan metode eksploratif untuk memahami permasalahan yang terjadi karena kehidupan sosial. Analisis induktif menurut Sekaran (2006, 36), “...merupakan proses di mana kita mengamati fenomena tertentu dan berdasarkan hal tersebut tiba pada kesimpulan”.

### 2. Prosedur penelitian.

Uma Sekaran (2006, 73) dalam bukunya “*Research Methods for Business*” menjelaskan langkah-langkah penelitian, yaitu pengamatan hingga pengambilan keputusan. Maka prosedur dalam penelitian kualitatif non hipotesis ini dapat dilihat pada Gambar 1.



**Sumber:** Diolah dari Uma Sekaran, *Research Methods for Business*, edisi keempat (Salemba Empat, 2006), hal.73.

### 3. Objek penelitian.

Objek penelitian dalam skripsi ini adalah pokok sengketa dalam putusan pengadilan pajak terkait pinjaman tanpa bunga pada perusahaan intragrup sesuai Tabel 1.

### 4. Jenis data.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Data primer berupa hasil wawancara. Wawancara akan dilakukan kepada:
  - 1) DJP: perwakilan regulator dan fiskus.
  - 2) Wajib Pajak: konsultan pajak dan *tax center*.
  - 3) Ahli Perpajakan: Widyaiswara pusdiklat pajak dan Profesor Perpajakan UI.
- b. Data sekunder, yaitu putusan pengadilan pajak, jurnal, buku, peraturan perpajakan di Indonesia mengenai pinjaman tanpa bunga, dan literatur lainnya yang terkait.

### 5. Cara pengumpulan data.

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan sebagai berikut.

- 1) Penelitian kepustakaan.
- 2) Metode wawancara.

Peneliti menggunakan metode wawancara semi terstruktur untuk mengumpulkan informasi yang relevan dengan topik penelitian.

### 6. Metode pengolahan data.

Neuman (2013, 562-569) dalam bukunya "Metodologi Penelitian Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif" menjelaskan tiga metode yang dapat digunakan untuk mengolah data kualitatif.

- 1) Penyandian dan pembentukan konsep, yaitu menyusun data dalam satu rangkaian pokok bahasan utama melalui proses *open coding*, *axial coding*, dan *selective coding*.
- 2) Penulisan memo analitis, yaitu mendokumentasikan dan menyusun berdasarkan kode data yang telah ditetapkan sebelumnya.
- 3) *Outcropping*, yaitu menganalisis untuk mendapatkan pemahaman yang utuh mengenai jawaban dari masalah yang diteliti. Pemahaman tersebut disimpulkan dengan melihat kembali bukti empiris yang telah disusun sebelumnya.

### 7. Sarana untuk pengolahan data.

Penulis menggunakan fasilitas pada *software Ms. Word 2010*. Selain itu, penulis juga menggunakan *Ms. Excel 2010*.

### 8. Strategi analisis.

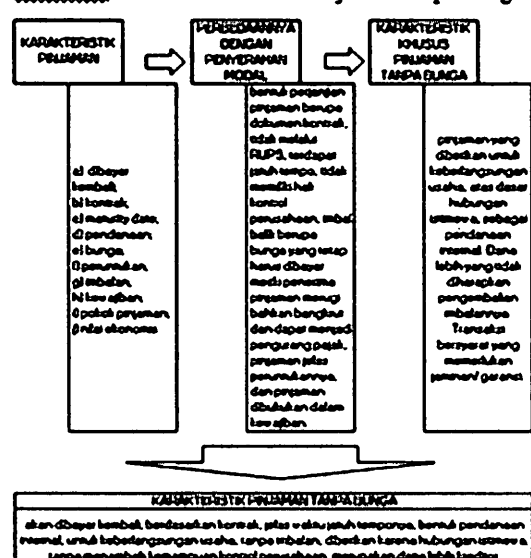
Penulis menggunakan strategi sesuai Neuman (2013, 570). Strategi tersebut yaitu tipe ideal yang di dalamnya mencakup konteks perbandingan dan analogi, hampiran berturutan, serta perbandingan analitis yang di dalamnya mencakup metode persetujuan dan perbedaan.

## HASIL PENELITIAN

Wawancara dilaksanakan dengan 25 pertanyaan yang dikelompokkan dalam empat tema besar yaitu: karakteristik pinjaman tanpa bunga, kriteria pinjaman tanpa bunga, kondisi kesulitan keuangan dan peraturan pinjaman tanpa bunga. Data hasil wawancara diolah melalui tahap *memoing*, *coding*, dan *data display*. Data disajikan dalam bentuk tabel dan diagram.

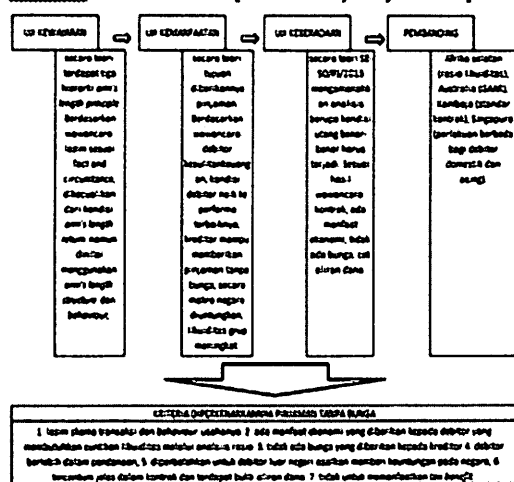
Analisis ini penulis lakukan dengan bantuan bagan. Untuk menggambarkan hasil penelitian atas tema karakteristik pinjaman tanpa bunga, penulis menggunakan bagan pada Gambar 2 dimana pinjaman tanpa bunga dilihat karakternya sebagai pinjaman dan bedanya dengan penyerahan modal, serta karakteristik khususnya yang bukan merupakan bagian dari pinjaman maupun penyerahan modal. Hasil penelitian mengenai analisis kriteria diperkenalkannya pinjaman tanpa bunga digambarkan pada Gambar 3 dimana harus memenuhi tes kewajaran, kemanfaatan dan keberadaan. Selain itu, kriteria tersebut juga dilihat dari sisi perbandingan yang ada di dunia internasional. Tema ketiga tentang analisis kondisi kesulitan keuangan digambarkan dalam Gambar 4 dimana kondisi tersebut dilihat dari sudut pandang tataran teori, sudut pandang lembaga jasa keuangan serta sudut pandang industri sejenis. Tema terakhir yang juga merupakan ringkasan dari ketiga tema utama sebelumnya digambarkan pada Gambar 5 tentang analisis Pasal 12 PP Nomor 94 Tahun 2010 sebagai peraturan pinjaman tanpa bunga yang saat ini berlaku. Berikut hasil analisis tersebut.

Gambar 2. Analisis Karakteristik Pinjaman Tanpa Bunga



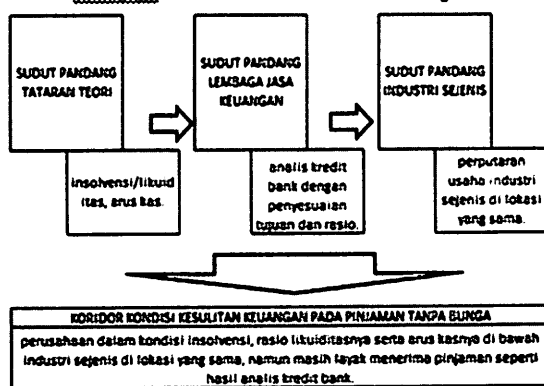
Sumber: Diolah dari hasil wawancara

Gambar 3. Analisis Kriteria Diperkenalkannya Pinjaman Tanpa Bunga



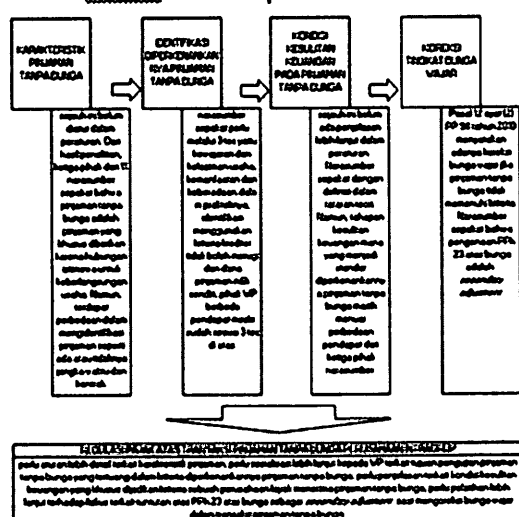
Sumber: Diolah dari hasil wawancara

Gambar 4. Analisis Kondisi Kesulitan Keuangan



Sumber: Diolah dari hasil wawancara

Gambar 5. Analisis Pasal 2 PP Nomor 94 Tahun 2010



Sumber: Diolah dari hasil wawancara

## PEMBAHASAN

### 1. Karakteristik pinjaman tanpa bunga.

Pinjaman dalam tataran akuntansi maupun perpajakan tidak memiliki definisi tersendiri. Pinjaman dalam ilmu akuntansi dikategorikan dalam definisi kewajiban menurut PSAK No. 57. Jika dilihat perbedaannya dengan modal menurut Darussalam (2013, 438) yang mengutip Marjana Helminen, pinjaman/utang memiliki karakteristik sesuai Tabel 2. Penulis menggunakan proses analisis persetujuan dan perbedaan atas pokok bahasan ini. Penulis melihat karakteristik pinjaman tanpa bunga melalui proses persetujuan bahwa pinjaman tanpa bunga memiliki karakter pinjaman. Selain itu, penulis melakukan perbedaan karakteristik pinjaman tanpa bunga jika dilihat dari karakter modal. Karakteristik pinjaman tanpa bunga berdasarkan hasil penelitian adalah akan dibayar kembali, berdasarkan kontrak, jelas waktu jatuh temponya, bentuk pendanaan internal, untuk keberlangsungan usaha, tanpa imbalan, diberikan karena hubungan istimewa, tanpa menambah kemampuan kontrol perusahaan, merupakan dana lebih kreditor.

Pokok sengketa ini terdapat pada putusan banding berikut.

#### a. PUT.29564/PP/MVII/15/2011

Transaksi tersebut belum dapat dikatakan sebagai pinjaman tanpa bunga karena tidak memenuhi karakter pinjaman sebagai bagian karakteristik pinjaman tanpa bunga. Kejelasan waktu jatuh tempo merupakan salah satu karakteristik pinjaman tanpa bunga.

#### b. PUT.31201/PP/M.XV/15/2011

Fiskus menyatakan terdapat tambahan ekonomi serupa dengan pembayaran bunga pada transaksi pinjaman tanpa bunga, sehingga transaksi tersebut tidak sesuai karakteristik pinjaman tanpa bunga. Menurut penulis, transaksi tersebut tidak sesuai dengan karakteristik pinjaman tanpa bunga, di mana tidak terdapat imbalan di dalamnya.

#### c. PUT.43501/PP/M.XIII/15/2013

Transaksi ini masih abu-abu selama tidak terdapat karakteristik pinjaman tanpa bunga sebagaimana hasil penelitian, misalnya berbentuk kontrak. Melihat hubungan antara pinjaman tanpa bunga dan piutang dagang dalam kasus ini, keduanya memiliki kesamaan sebagai transfer dana. Jika secara nyata tidak ada transfer bunga maka seharusnya ada dokumen pendukung bahwa kompensasi atas dana tersebut adalah barang atau jasa.

d. PUT.44876/PP/M.V/15/2013

Karakteristik utama pinjaman tanpa bunga bahwa diberikan dalam rangka menjaga keberlangsungan usaha sudah sesuai. Namun, tambahan ekonomi berupa bunga menjadikan transaksi ini tidak lagi sesuai karakteristik pinjaman tanpa bunga.

e. PUT.49894/PP/M.XV/15/2014

Transaksi ini belum dapat dikategorikan sebagai pinjaman hanya karena adanya kontrak pinjaman. Kontrak pinjaman setidaknya menerangkan karakteristik pinjaman tanpa bunga terkait peruntukan diberikannya pinjaman tanpa bunga dan waktu pengembalian yang jelas.

f. PUT.51874/PP/M.XVA/12/2014

Transaksi pinjaman harus sesuai dengan karakteristik pinjaman, khususnya jika pinjaman tersebut tanpa bunga. Ketidadaan kontrak menjadikannya tidak sesuai salah satu karakteristik pinjaman bahwa didasarkan atas kontrak. Adanya kontrak tanpa memberikan syarat akan dibayarkan kembali atau tidaknya pokok pinjaman maka transaksi tersebut bukanlah pinjaman. Transaksi tersebut lebih mirip dengan penyertaan modal.

g. PUT.51875/PP/M.XVA/12/2014

WP berpendapat transaksi ini adalah penyerahan modal. Namun, tidak ada dokumen pendukung berupa kontrak maupun akte penyertaan modal. Untuk menentukan suatu transaksi memiliki substansi sebagai pinjaman tanpa bunga atau penyertaan modal, menurut penulis harus dikembalikan kepada karakteristik masing-masing jenis transaksi. Tidak serta merta tidak adanya imbalan berarti bukan pinjaman tanpa bunga. Transaksi dikatakan sebagai pinjaman tanpa bunga di antaranya karena memiliki kontrak pinjaman.

h. PUT.58582/PP/M.VIB/12/2014

WP berpendapat dana yang diterimanya merupakan modal yang belum diaktekan. Perlu dilihat apakah dana tersebut akan dikembalikan dalam jangka waktu tertentu. Tujuan diberikannya dana untuk memenuhi penyertaan modal atau membantu keberlangsungan usaha juga perlu dilihat.

Sengketa terkait karakteristik pinjaman tanpa bunga terkesan selesai dengan pembuktian di depan hakim pengadilan pajak. Akan tetapi, dengan melihat analisis hasil penelitian terhadap putusan banding di atas kita memahami bahwa ketidadaan karakteristik pinjaman khususnya pinjaman tanpa bunga menjadikan beban pembuktian tidak memiliki dasar dan berlanjut dari satu pembuktian kepada pembuktian lain.

Pembuktian ini menjadi beban berat pada pelaksanaan kewajiban perpajakan jika dilakukan oleh WP. Sebaliknya jika beban pembuktian ada di DJP, DJP telah menambah *tax collection cost*.

## **2. Kriteria diperkenankannya pinjaman tanpa bunga.**

Berdasarkan hasil analisis di atas, salah satu karakteristik pinjaman tanpa bunga adalah terjadi karena adanya hubungan istimewa. DJP memiliki wewenang menilai kewajaran dan kelaziman terkait transaksi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa. Hubungan istimewa yang dimaksud adalah hubungan istimewa pada UU PPh Pasal 18 ayat (4). Bahkan OECD Guideline 2010 Paragraf 1.65 menyatakan bahwa apabila suatu transaksi tidak terbukti secara substansi sebagai pinjaman maka otoritas pajak berwenang melakukan reklasifikasi menjadi transaksi penyertaan modal dan mengenakan pajak sesuai hasil reklasifikasi tersebut.

Narasumber sepakat bahwa transaksi pinjaman tanpa bunga harus dilihat kebenarannya. Kebenaran transaksi pinjaman tanpa bunga ketika transaksi tersebut mencerminkan kewajaran. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari upaya *tax avoidance* yang mungkin dilakukan melalui transaksi pinjaman tanpa bunga. Dalam hal ini adalah skema *transfer pricing* atas transaksi pinjaman tanpa bunga.

Dalam transaksi pinjaman tanpa bunga yang hanya terjadi pada perusahaan intragrup, maka analisis fungsional sebagai salah satu atribut dalam analisis kesebandingan digunakan. Analisis fungsional melihat kewajaran dan kelaziman kondisi suatu transaksi dari sisi fungsi, risiko dan aset. Analisis fungsional ini terdapat pada lampiran SE-50/PJ/2013. Selain itu, lampiran SE-50/PJ/2013 juga memberikan petunjuk dalam melakukan analisis bunga pinjaman. Narasumber menganalogikan analisis tersebut ke dalam tiga tes yaitu tes keberadaan, tes kemanfaatan, dan tes kewajaran dan kelaziman. Analogi ini disesuaikan dengan tiga pertimbangan dalam analisis fungsional seperti disebutkan sebelumnya. Analisis fungsional dan analisis bunga pinjaman dalam SE-50/PJ/2013 sedikit banyak telah sesuai dengan analisis fungsional dan analisis intercompany loan OECD yang berisi: analisis FAR, analisis substansi transaksi, analisis kelayakan kredit, evaluasi syarat dan kondisi yang terkait serta estimasi tingkat bunga wajar.

Hasil pengolahan data menunjukkan urutan prioritas pengujian yang harus dilakukan sebagai langkah menentukan kriteria diperkenankannya pinjaman tanpa bunga, yaitu tes kewajaran dan kelaziman usaha, tes kemanfaatan, serta tes keberadaan.

Berdasarkan hasil penelitian, kriteria ideal pinjaman tanpa bunga setidaknya mencakup hal-hal berikut:

- a. Lazim skema transaksi dan perilaku usahanya;
- b. Ada manfaat ekonomi yang diberikan kepada debitor yang membutuhkan suntikan likuiditas melalui analisis rasio;
- c. Tidak ada bunga yang diberikan kepada kreditor;
- d. Debitor berlebih dalam pendanaan;
- e. Diperbolehkan untuk debitor luar negeri asalkan memberi keuntungan pada negara;
- f. Tercantum jelas dalam kontrak dan terdapat bukti aliran dana;
- g. Tidak untuk memanfaatkan *tax benefit*.

Pokok sengketa tentang kriteria pinjaman tanpa bunga terdapat pada putusan banding berikut.

- a. PUT.31201/PP/M.XV/15/2011

Saat memberikan pinjaman tanpa bunga kepada debitor, kreditor dalam keadaan merugi. Saat itu, debitor dinilai layak menerima pinjaman tersebut karena sedang dalam kesulitan keuangan. Berdasarkan hasil penelitian, kriteria diperkenankannya pinjaman tanpa bunga berupa kondisi pemberi pinjaman yang tidak merugi adalah upaya pengujian kelaziman dan kewajaran usaha. Pemberian pinjaman tanpa bunga diberikan karena adanya dana berlebih pada pemberi pinjaman guna disalurkan sebagai investasi pada afiliasinya tanpa mengharapkan pengembalian berupa bunga. Jika pemberi pinjaman dalam kondisi merugi, maka dia masih mengharapkan pengembalian atas setiap dana yang diinvestasikan. Perilaku lazim perusahaan adalah mempertahankan keberlangsungan usahanya sesuai *separate entity approach*. Maka transaksi dalam putusan banding ini tidak wajar. WP perlu memahami lebih lanjut pengujian transaksi dan tujuannya yang tercermin dalam empat kriteria diperkenankannya pinjaman tanpa bunga.

- b. PUT.44876/PP/M.V/15/2013

WP tidak memenuhi keempat syarat kumulatif diperkenankannya pinjaman tanpa bunga, yaitu pada kriteria dana pinjaman berasal

dari dana pemberi pinjaman sendiri. Alasan WP, hal ini dilakukan untuk menjaga arus kas penerima pinjaman agar dapat beroperasi membayar biaya operasionalnya.

Hal-hal yang seharusnya tercermin dalam kriteria diperkenankannya pinjaman tanpa bunga adalah lazim secara skema dan perilaku usaha. Pemberian pinjaman tanpa bunga dari kreditor menggunakan dana milik pihak ketiga artinya penerima pinjaman dapat langsung meminjam kepada pemilik dana sendiri tanpa melalui kreditor tersebut. Kondisi ini membuat skema transaksi ini tidak lazim. WP perlu memahami lebih lanjut pengujian transaksi dan tujuannya yang tercermin dalam empat kriteria diperkenankannya pinjaman tanpa bunga.

- c. PUT.46740/PP/M.XI/12/2013

Dalam transaksi ini, surat perjanjian ada dengan tujuan untuk membantu kelangsungan usaha. Namun menurut fiskus, transaksi tersebut tidak memenuhi salah satu kriteria diperkenankannya pinjaman tanpa bunga, yaitu dana milik pemegang saham sendiri. Menurut penulis, meskipun karakteristik transaksi ini cukup jelas diidentifikasi tetapi transaksi ini tidak mencerminkan kewajaran sesuai empat kriteria yang diberikan. Pinjaman tanpa bunga yang diberikan menggunakan dana pihak ketiga artinya penerima pinjaman dapat langsung meminjam kepada pemilik dana sendiri tanpa melalui kreditor tersebut. Kondisi ini membuat skema transaksi ini tidak lazim.

### 3. Kondisi kesulitan keuangan.

Menurut Fachrudin (2008,2-3), financial distress terdapat empat tipe. sebagian besar narasumber menyatakan tahap insolvensi merupakan tahap yang paling sesuai untuk menerjemahkan kondisi kesulitan keuangan sehingga suatu perusahaan layak mendapatkan pinjaman tanpa bunga. Alasan yang dikemukakan oleh narasumber adalah karena kondisi business failure maupun economic failure masih memungkinkannya menerima pinjaman dengan bunga. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Khaira Amalia Fachrudin (2008, 2) yang mengutip Brigham dan Daves. Kondisi ini juga sesuai dengan hasil wawancara terkait sudut pandang LJK berupa bank dalam menilai kesulitan keuangan calon debitornya. Diperlukan analisis kredit handal untuk melihat kemampuan membayar kembali pokok pinjaman.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, kesulitan keuangan yang merupakan kriteria diperkenankannya pinjaman tanpa bunga adalah perusahaan dalam kondisi insolvensi, rasio likuiditasnya serta arus kasnya di bawah industri sejenis di lokasi yang sama, namun masih layak menerima pinjaman seperti hasil analisis kredit bank.

Pokok sengketa tentang kondisi kesulitan keuangan terdapat pada putusan banding nomor PUT.31201/PP/M.XV/15/2011 dengan isi sengketa kondisi kesulitan keuangan diakui WP dengan adanya kerugian sedangkan menurut fiskus rasio likuiditasnya masih tergolong likuid. Menurut penulis, kondisi merugi belum menjadikan sebuah perusahaan layak menerima pinjaman tanpa bunga. Kondisi ini harus dilihat lebih jauh pada rasio likuiditas perusahaan dan arus kasnya. Jika memungkinkan, kondisi ini dapat dibandingkan dengan kondisi industri sejenis di lokasi yang sama.

## SIMPULAN

1. Karakteristik pinjaman tanpa bunga pada perusahaan intragrup adalah akan dibayar kembali, berdasarkan kontrak, jelas waktu jatuh temponya, bentuk pendanaan internal, untuk keberlangsungan usaha, tanpa imbalan, diberikan karena hubungan istimewa, tanpa menambah kemampuan kontrol perusahaan, merupakan dana lebih kreditor. Sampai saat ini belum ada regulasi yang mengakomodir karakteristik ini.
- 2.a. Pinjaman tanpa bunga merupakan transaksi khusus yang dilakukan hanya oleh perusahaan-perusahaan yang memiliki hubungan istimewa sehingga diperlukan kriteria untuk menilai kewajarannya dalam rangka mencegah upaya *tax avoidance*. Saat ini, DJP memiliki empat kriteria diperkenankannya pinjaman tanpa bunga. Langkah identifikasi kewajaran pada transaksi pinjaman tanpa bunga menggunakan analisis fungsional. Lebih lanjut pada analisis *intercompany loan* OECD. Di Indonesia, pelaksanaan analisis tersebut tertuang pada lampiran SE-50/PJ/2013. Kriteria yang mencerminkan kewajaran transaksi pinjaman tanpa bunga berdasarkan analisis OECD dan lampiran SE-50/PJ/2013 terkait tiga pengujian, yaitu kewajaran dan kelaziman, kemanfaatan dan keberadaan. Hasil perbandingan dengan negara lain menunjukkan analisis yang tidak jauh berbeda. Terdapat beberapa perlakuan pinjaman tanpa bunga di negara lain yang dapat diadopsi dalam regulasi otoritas pajak Indonesia. Di antaranya,

melalui pengujian dokumen seperti otoritas pajak Kamboja, perbedaan perlakuan afiliasi WP domestik dan asing oleh otoritas pajak Singapura, GAAR Australia, dan batas kondisi likuiditas debitor serta batas tanggung jawab kreditor seperti otoritas pajak Afrika Selatan.

- 2.b. Kriteria diperkenankannya pinjaman tanpa bunga saat ini sudah mencerminkan kewajaran transaksi berdasarkan analisis fungsional karena sudah mencakup ketiga pengujian. Meskipun demikian, terdapat beberapa kriteria yang di lapangan dipahami berbeda oleh WP, yaitu kriteria dana milik pemberi pinjaman sendiri dan kriteria pemberi pinjaman tidak sedang merugi. WP perlu memahami lebih lanjut mengenai pengujian dan tujuannya yang tercermin pada empat kriteria diperkenankannya pinjaman tanpa bunga Pasal 12 PP Nomor 94 Tahun 2010.
3. Koridor kondisi kesulitan keuangan sebagai salah satu kriteria diperkenankannya pinjaman tanpa bunga pada perusahaan intragrup dapat dilihat dari tataran teori, sudut pandang LJK dan sudut pandang industri sejenis. Berdasarkan tiga sudut pandang tersebut, koridor kondisi kesulitan keuangan dalam transaksi pinjaman tanpa bunga ini adalah perusahaan dalam kondisi insolvensi, rasio likuiditasnya serta arus kasnya di bawah industri sejenis di lokasi yang sama, namun masih layak menerima pinjaman seperti hasil analisis kredit bank. Sampai saat ini belum ada penjelasan lebih lanjut tentang koridor kondisi kesulitan keuangan yang dimaksud pada pasal 12 ayat (1) PP Nomor 94 Tahun 2010.

## SARAN

1. Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa karakteristik pinjaman tanpa bunga dikembalikan kepada karakteristik pinjaman yang belum memiliki definisi pasti. Karakteristik khusus atas pinjaman tanpa bunga dipahami sama oleh ketiga pihak narasumber. Sebaiknya DJP perlu membuat aturan lebih detail terkait karakteristik pinjaman. Lebih lanjut DJP perlu menjelaskan substansi pinjaman tanpa bunga diberikan melalui kewenangan Direktorat Peraturan Perpajakan 2. Hal ini dapat berupa penjelasan atas Pasal 12 PP Nomor 94 Tahun 2010 atau penjelasan dalam peraturan di bawahnya berupa Peraturan Menteri Keuangan (PMK).



2. Terdapat beberapa kriteria yang dipahami berbeda oleh WP di lapangan, yaitu kriteria dana milik pemberi pinjaman sendiri dan kriteria pemberi pinjaman tidak sedang merugi. Sehingga, perlu sosialisasi lebih lanjut oleh Direktorat Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) kepada WP terkait tujuan pengujian pinjaman tanpa bunga yang tertuang dalam kriteria diperkenalkannya pinjaman tanpa bunga. Hal ini dapat dilakukan melalui penyamaan persepsi konsultan pajak atas tujuan adanya kriteria diperkenalkannya pinjaman tanpa bunga.

3. Koridor kesulitan keuangan dalam Pasal 12 ayat (1) PP Nomor 94 Tahun 2010 dipahami berbeda oleh ketiga pihak narasumber. WP berpendapat kondisi merugi sudah dapat dijadikan acuan. Fiskus berpendapat harus melihat arus kas dan insolvensinya. Akademisi berpendapat kondisi ini tidak dapat didefinisikan karena terlalu dinamis dan spesifik setiap WP. Oleh karena itu, perlu penjelasan atas Pasal 12 ayat (1) PP Nomor 94 Tahun 2010 terkait kondisi kesulitan keuangan yang khusus dijadikan kriteria sebuah perusahaan layak menerima pinjaman tanpa bunga. Penjelasan ini dapat berupa penjelasan atas pasal dalam PP atau penjelasan dalam peraturan di bawahnya berupa PMK.

4. Dalam pelaksanaan Pasal 12 ayat (2) PP Nomor 94 Tahun 2010 terdapat *gap*. Fiskus melakukan koreksi atas pinjaman tanpa bunga dan membebaskan kewajiban PPh 23 atas bunga. Padahal, pihak WP maupun akademisi sepakat bahwa PPh 23 atas bunga merupakan *secondary adjustment* setelah bunga dibayarkan atau akan dibayarkan sesuai amanah dalam Pasal 23 UU PPh. Diperlukan peningkatan kapabilitas fiskus terkait hal ini melalui kewenangan Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan. Peningkatan kapabilitas ini dapat berupa diklat atau *in house training* kepada pemeriksa pajak.

## DAFTAR REFERENSI

### Buku

Brealey, Myers dan Marcus. 2009. *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan Perusahaan*. Jakarta: Erlangga.

Brown, K. B. 2012. *A Comparative Look at Regulation of Corporate Tax Avoidance*. New York: Springer.

Copeland dan Weston. 1992. *Manajerial Finance*. Jakarta: Binarua Aksara.

Creswell, John W. 2009. *Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. Third Edition*. Thousand Oaks California: SAGE Publication.

Creswell, John W. 2013. *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset Edisi 3*. Thousand Oaks California: SAGE Publication.

Darussalam, Septriadi, Danny dan Kristiaji, B. Bawono. 2013. *Transfer Pricing: Ide, Strategi, dan panduan Praktis dalam Perspektif Pajak Internasional*. Jakarta: Danny Darussalam Tax Center.

Fachrudin, Khaira Amalia. 2008. *Kesulitan Keuangan Perusahaan dan Personal*. Medan: USU Press.

Hansen, Don R. dan Mowen, Maryanne M. 2012. *Akuntansi Manajerial Buku 1 Edisi 8*. Jakarta: Salemba Empat.

Harnanto. 2003. *Akuntansi Perpajakan Edisi Pertama*. Yogyakarta: BPFE.

Harold, J. 2013. Indian Intercompany Loans Legislation. *Journal of International Taxation*.

Neuman, W. Lawrence. 1991. *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*. Needham Heights: A Viacom Company.

Nugroho, M. Iqbal Dwi. *Analisis Prediksi Financial Distress dengan Menggunakan Model Altman Z-Score Modifikasi 1995*. Semarang: Skripsi Mahasiswa Universitas Diponegoro, 2012.

Radhakrishnan Gopalan Vikram Nanda Amit Seru. 2007. *Related Firms and Financial Support: Evidence from Indian Business Groups*. *Journal of Financial Economics* 86.

Rahayu, Ning. 2008. Praktik Penghindaran Pajak oleh *Foreign Direct Investment* Berbentuk Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Volume 10, Nomor 2, Juli 2010: 171 - 180*

- Riyanto, Bambang. 2004. *Dasar-Dasar Pembelanjaan Perusahaan*. Yogyakarta: BPFE-UGM.
- Sawir, Agnes. 2004. *Kebijakan Pendanaan dan Restrukturisasi Perusahaan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka.
- Sea Jin Chang and Jaebum Hong. 2000. Economic Performance of Group-Affiliated Companies in Korea: Intragroup Resource Sharing and Internal Business Transactions. *The Academy of Management Journal*, Vol. 43, No. 3.
- Sekaran, Uma. 2006. *Research Methods for Business*. Jakarta: Salemba Empat.
- Subramanyam, K.R. dan Wild, John J. 2013. *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. 2003. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Pusat Bahasa Depdiknas.
- Supramono dan Damayanti, Theresia Woro. 2010. *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Triawan, Dani Ade dan Kodoatie, Johanna Maria. 2012. Penggalan Potensi PPh atas Dividen Sebagai Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak di KPP Madya Semarang. *Diponegoro Journal Of Economics Volume 1, No. 1*.
- Van Der Vlies, I.C. dan Doludjawa, Linus. 2005. *Buku Pegangan Perancang Peraturan Perundang-Undangan*. Jakarta: Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan.
- Peraturan**
- Australian Tax Office. *Taxation Administration Act*. Australia: Australia Tax Office, 1953.
- \_\_\_\_\_. *Income Tax Assessment Act*. Australia: Australia Tax Office, 1936.
- Central Board for Direct Taxes. *Income Tax Act*. New Delhi: Central Board for Direct Taxes, 1961.
- Direktur Jenderal Pajak. *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-32/PJ/2011* tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-43/Pj/2010 tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha Dalam Transaksi Antara Pajak dengan Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa. Jakarta: Direktur Jenderal Pajak, 2010.
- \_\_\_\_\_. *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-23/PJ/2013* tentang Standar Pemeriksaan. Jakarta: Direktur Jenderal Pajak, 2013.
- \_\_\_\_\_. *Surat Penegasan Direktur Jenderal Pajak Nomor: S-165/PJ.312/1992* tentang Pinjaman Tanpa Bunga dari Pemegang Saham. Jakarta: Direktur Jenderal Pajak, 1992.
- \_\_\_\_\_. *Surat Penegasan Direktur Jenderal Pajak Nomor: S-89/PJ.311/2000* tentang Pinjaman Tanpa Bunga dari Pemegang Saham. Jakarta: Direktur Jenderal Pajak, 2000.
- General Department of Taxation. *Article 18 Law on Taxation (LOT), Circular 1707*. Cambodia: General Department of Taxation, 2013.
- Ikatan Akuntan Indonesia. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 7*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia, 2009.
- \_\_\_\_\_. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 26*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia, 2011.
- \_\_\_\_\_. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 50*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia, 2010.
- \_\_\_\_\_. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 57*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia, 2009.
- Inland Revenue Authority of Singapore. *Supplementary TP Guidelines for related party loan Singapore*. Singapore: Inland Revenue Authority of Singapore, 2009.
- Internal Revenue Services. *Code 7872*. Washington: Internal Revenue Service, 1984.
- International Accounting Standard Board (IASB). 2007. *International Accounting Standard 23 Borrowing Cost*.
- \_\_\_\_\_. 2009. *International Accounting Standard 24 Related Party Disclosures*.
- \_\_\_\_\_. 2009. *International Accounting Standard 37 Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets*.
- \_\_\_\_\_. 2012. *International Accounting Standard 32 Financial Instrument: Presentation*.

- Menteri Keuangan. *Peraturan Tata Cara Pemeriksaan*. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013.
- National Tax Agency of Japan. *Corporate Tax Law 37 & 35-2*. Tokyo: National Tax Agency of Japan, 2007.
- OECD. *OECD Model Tax Convention*. Paris: OECD Publishing, 2010.
- \_\_\_\_\_. *OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administration 2010*. Paris: OECD Publishing, 2010.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Pajak Penghasilan*. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
- \_\_\_\_\_. *Peraturan Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan*. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010.
- \_\_\_\_\_. *Peraturan Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan*. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011.
- South Africa Revenue Services. *Income Tax Act*. South Africa: South Africa Revenue Services, 1962.
- Website**
- Darussalam dan Dany. 2009. *Tax Avoidance, Tax Planning, Tax Evasion dan Anti Avoidance Rule*. <http://www.ortax.org/ortax/?mod=issue&page=show&id=36&q=&hlm=3> (diakses 9 September 2015).
- Menteri Keuangan. 2015. *Realisasi Pendapatan Negara Tahun 2014 Capai Rp1.537,2 Triliun*. <http://www.kemenkeu.go.id/Berita/realisasi-pendapatan-negara-tahun-2014-capai-rp15372-triliun> (diakses 9 September 2015).
- Pengadilan Pajak. 2011. *Putusan Banding Nomor PUT. 29564/PP/MVII/15/2011*. <http://www.setpp.depkeu.go.id/ind/News/Risalah.asp> (diakses 24 Juni 2015).
- \_\_\_\_\_. 2011. *Putusan Banding Nomor PUT. 31201/PP/M. XV/15/2011*. <http://www.setpp.depkeu.go.id/ind/News/Risalah.asp> (diakses 26 Maret 2015).
- \_\_\_\_\_. 2013. *Putusan Banding Nomor PUT. 43501/PP/M. XIII/15/2013*. <http://www.setpp.depkeu.go.id/ind/News/Risalah.asp> (diakses 26 Maret 2015).
- \_\_\_\_\_. 2013. *Putusan Banding Nomor PUT. 44876/PP/M. V/15/2013*. <http://www.setpp.depkeu.go.id/ind/News/Risalah.asp> (diakses 16 Mei 2015).
- \_\_\_\_\_. 2013. *Putusan Banding Nomor PUT. 46740/PP/M. XI/12/2013*. <http://www.setpp.depkeu.go.id/ind/News/Risalah.asp> (diakses 22 Maret 2015).
- \_\_\_\_\_. 2014. *Putusan Banding Nomor PUT. 49894/PP/M. XV/15/2014*. <http://www.setpp.depkeu.go.id/ind/News/Risalah.asp> (diakses 26 Maret 2015).
- \_\_\_\_\_. 2014. *Putusan Banding Nomor PUT. 51874/PP/M. XVA/12/2014*. <http://www.setpp.depkeu.go.id/ind/News/Risalah.asp> (diakses 25 Mei 2015).
- \_\_\_\_\_. 2014. *Putusan Banding Nomor PUT. 51875/PP/M. XVA/12/2014*. <http://www.setpp.depkeu.go.id/ind/News/Risalah.asp> (diakses 31 Maret 2015).
- \_\_\_\_\_. 2014. *Putusan Banding Nomor PUT. 58582/PP/M. VIB/12/2014*. <http://www.setpp.depkeu.go.id/ind/News/Risalah.asp> (diakses 4 Februari 2015).
- The Income Tax Appellate Tribunal. 2011. *Putusan Banding Nomor ITA 894/2011*. <http://indiankanoon.org/doc/162989256/> (diakses 18 Agustus 2015).
- \_\_\_\_\_. 2012. *Putusan Banding Nomor ITA NO. 7354/MUM/11(A.Y. 2007-08)*.